

MANAJEMEN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN DI SDN SARIROGO SIDOARJO

Misbahul Munir¹, M. Athoiful Fanan²

email: munirmisbahul90@gmail.com¹

email: emailatho@gmail.com²

STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang¹

Jl. Cengger Ayam No. 25 Malang 65141 Jawa Timur

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo²

Jl. Raya Sarirogo No 01- Sidoarjo- Jawa Timur

Article History:

Dikirim:

.....

Direvisi:

.....

Diterima:

.....

Korespondensi Penulis:

HP / WA

Abstraksi:

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran terkait manajemen keuangan dan pembiayaan di SDN Sarirogo yang meliputi: sumber dana Pendidikan; perencanaan anggaran Pendidikan; pembukuan biaya Pendidikan; pelaporan dan pengawasan biaya Pendidikan. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Teknik pengumpul data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data primer didapat dari hasil wawancara langsung dengan kepala sekolah, bendahara dan perwakilan dari komite sekolah. Sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan data hasil dari dokumentasi dan wawancara dengan wali siswa Adapun analisis data dengan menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan (1) sumber dana Pendidikan di SDN Sarirogo meliputi: (a) BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), (b) BOS REG (Bantuan Operasional Sekolah Reguler), (c) dana yang berasal dari Komite Sekolah, (d) dana Hibah; (2) Proses perencanaan anggaran pendidikan di SDN Sarirogo diawali dengan pembentukan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah); (3) Pembukuan biaya pendidikan di SDN Sarirogo secara fisik yakni buku kas umum, buku khas tunai, buku bank, dan buku pajak. (4) Pelaporan biaya pendidikan di SDN Sarirogo dilakukan secara *online* pada laman dinas pendidikan. Adapun tahapan pelaporan yakni membuat nota dan kuwitansi (*hardfile*), *scanning* bukti nota dan kuwitansi (*softfile*), kemudian masuk laman dan mengisi laporan serta melampirkan bukti. *Monitoring* dana pendidikan melibatkan bendahara, komite sekolah, kepala sekolah, dan dinas pendidikan.

Kata Kunci: *Manajemen Keuangan, Pembiayaan, Sekolah Dasar*

Abstract:

The purpose of this study was to obtain an overview regarding financial management and financing at SDN Sarirogo which includes: education funding sources; Education budget planning; bookkeeping tuition fees; reporting and monitoring of Education costs. This study used a qualitative descriptive design. The technique of collecting data by means of interviews, documentation and observation. Primary data sources were obtained from direct interviews with school principals, treasurers and representatives of the school committee. Meanwhile, secondary data was obtained based on data from documentation and interviews with student guardians. The data analysis used data triangulation. The results showed (1) sources of education funding at SDN Sarirogo include: (a) BOSDA (Regional School Operational Assistance), (b) BOS REG (Regular School Operational Assistance), (c) funds from the School Committee, (d) Grant funds; (2) The education budget planning process at SDN Sarirogo begins with the formation of the RKAS (School Activity and Budget Plan); (3) Physical bookkeeping of education costs at SDN Sarirogo, namely general cash books, typical cash books, bank books, and tax books. (4) Reporting on education costs at SDN Sarirogo is done online on the website of the education office. The reporting stages include making notes and receipts (hardfile), scanning evidence of notes and receipts (softfile), then entering the page and filling out the report and attaching the butki. Monitoring of education funds involves the treasurer, school committee, school principals, and the education office.

Keywords: *Financial Management, Funding, Elementary School*

PENDAHULUAN

Kualitas sebuah negara dapat dilihat dari beberapa faktor, di antaranya adalah faktor pendidikan. Sekolah merupakan sebuah lembaga yang dipersiapkan untuk menyediakan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan kualitas suatu negara. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga) yang dianggap penting adalah masalah tentang pembiayaan, pembiayaan merupakan unsur yang multak harus tersedia. Sebagai contoh pemerintah Republik Indonesia sesuai amanat Undang-Undang setiap

tahunnya telah mencanangkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), demikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah.¹

Dalam peningkatan mutu pendidikan, pemerintah menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dijadikan pedoman lembaga pendidikan atau sekolah menjalankan fungsinya. Salah satu dari 8 SNP tersebut adalah standar pembiayaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun dan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.² Pembiayaan pendidikan meliputi pada tiga hal yakni biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.³

Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya.⁴ Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Tanpa dukungan biaya penyelenggaraan pendidikan tidak dapat terus dijalankan karena membutuhkan biaya untuk operasional proses pengajaran. Meskipun pembiayaan pendidikan bukan satu-satunya faktor keberhasilan, tanpa adanya pembiayaan yang mencukupi, maka pendidikan yang berkualitas hanya dalam angan-angan.⁵

Sekolah sebagai lembaga atau institusi mempunyai satu atau lebih tujuan, untuk itu perlu disusun rencana dan langkah bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Pada umumnya tujuan sekolah dipaparkan dalam bentuk Visi dan misi sekolah. Cara pencapaiannya dilakukan melalui berbagai perencanaan, salah satunya yaitu perencanaan dalam hal keuangan yang dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Selanjutnya setelah disahkan menjadi APBS, dengan beberapa langkah yang harus dilalui tentunya. APBS dirinci secara terukur dan realistis dalam jenis-jenis kegiatan konkret yang mampu dilaksanakan.⁶

¹ Jefril Rahmadoni, *Isu Global Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di SD Indonesian Creative School* Pekanbaru, JMKSP, Vol. 3, No. 2, (Palembang: Universitas PGRI Palembang, 2018), hlm. 161-162.

² Ririn Tius Eka Margareta, *Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri*, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol. 4, No. 2, (Salatiga: UKSW, 2017), hlm. 196-197.

³ Masditou, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu*, Jurnal ANSIRU PAI, Vol. 1, No. 2, (Medan: POLTEKPAR, 2017), hlm. 121.

⁴ Dedi Supriyadi, *Satuan Biaya Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 3.

⁵ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), hlm. 5.

⁶ Mimin Sundari Nasution, *Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Berbasis Total Quality Management (TQM)*, Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol.4, No. 2, (Pekanbaru: Universitas Riau, 2012), hlm. 151-152

Suatau lembaga pendidikan dituntut untuk bisa menyelenggarakan pendidikan dengan biaya yang tidak terlalu tinggi tapi harus tetap terus meningkatkan mutu pendidikan dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukanlah suatu pengelolaan keuangan melalui sebuah manajemen pembiayaan yang baik untuk meningkatkan mutu sekolah mendapatkan dana untuk menyelenggarakan pendidikan dan bagaimana lembaga pendidikan mengelola dana tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan.

METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun Teknik pengumpul data dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data primer didapat dari hasil wawancara langsung dengan kepala sekolah, bendahara dan perwakilan dari komite sekolah. Sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan data hasil adari dokumentasi dan wawancara dengan wali siswa. Adapun analisis data dengan menggunakan triangulasi data. Data yang diperoleh hasil dari di lapangan dikumpulkan dan dikomparasikan untuk memperoleh data yang valid dan reliabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Dana Pendidikan

Sumber pendapatan dan penerimaan sekolah dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, organisasi dan perorangan. Anggaran yang berasal dari pemerintah berbentuk dari kegiatan-kegiatan rutin (DIK) dan proyek-proyek pembangunan (DIP). Sedangkan anggaran yang datang dari masyarakat bisa berupa bentuk SPP/DPP dan sumbangan-sumbangan sukarela. Walau banyak sumberdana yang datang namun tetap yang masih menjadi andalan setiap sekolah adalah anggaran yang datang dari pemerintah.⁷

1. BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah)

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non personal, meskipun dimungkinkan untukmembiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil

⁷ Matin, *Manajemen Pembiayaan*, (Depok: Rajawali Pers, 2014), hlm. 77.

dan biaya investasi. Penyaluran dana BOSDA dilakukan setiap triwulan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.⁸

Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) dijenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.⁹

2. BOS REG (Bantuan Operasional Sekolah Reguler)

Penggunaan BOS Reguler di Sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Reguler kepala Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Dana BOS Reguler yang diterima Sekolah tiap triwulan atau semester dapat direncanakan untuk digunakan membiayai kegiatan lain pada triwulan atau semester berikutnya. Penggunaan BOS Reguler diprioritaskan untuk kegiatan operasional Sekolah nonpersonalia. Satuan biaya untuk belanja dengan menggunakan dana BOS Reguler mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.¹⁰

3. Komite Sekolah (Masyarakat sekolah)

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa Komite Sekolah atau madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sara dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.¹¹ Menurut Sagala yang menyatakan bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas di daerahnya.¹²

Sebagai badan kemitraan sekolah yang mewadahi konektivitas antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, kedudukan komite sekolah memiliki fungsi yang penting seperti yang

⁸ JDIH Sidoarjo, Peraturan Bupati Sidoarjo No. 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknik Penyediaan dan Penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Negeri dan Swasta Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018, diakses dari jdih.sidoarjo.kab.go.id pada 24 November 2019 pukul 8.20 WIB.

⁹ Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Mengenal Dana BOS, diakses dari <http://bos.dispendik.sidoarjo.kab.go.id/blog/mengenal-dana-bos-pada-3-Desember-2019>, pukul 09.30.

¹⁰ Jogolabang, Penggunaan Dana dan Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SD, diakses dari <https://www.jogloabang.com/permendikbud-nomor-18-tahun-2019-tentang-perubahan-juknis-bos-2019/penggunaan-dana-dan-komponen> pada 24 November 2019 pukul 09.49.

¹¹ Ali Mustadi, Enny Zubaidah & Sumardi, Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar, Cakrawala Pendidikan, Vol. 35, No. 3, (Yogyakarta: UNY, 2016), hlm. 313.

¹² Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 251.

disampaikan oleh Rehberg yaitu: ¹³ Memberikan kebijakan; Memberikan penilaian; Menyediakan sumber dana keuangan; Menjembatani hubungan dengan masyarakat luas; Melakukan perencanaan dan evaluasi pendidikan

4. Hibah

Hibah merupakan bantuan social dari pemerintah daerah dalam mendanai inverstasi atau biaya operasi satuan pendidikan yang sesuai dengan perundang-undangan.¹⁴

Adapun sumber dana Pendidikan di SDN Sarirogo meliputi: (1) BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah); (2) BOS REG (Bantuan Operasional Sekolah Reguler); (3) Komite Sekolah (Masyarakat sekolah), yakni Dana yang berasal dari masyarakat sekolah ataupun wali murid digunakan dalam kegiatan-kegiatan penunjang yang dihimpun oleh masyarakat sekolah sendiri. Kegiatan yang termasuk di dalamnya seperti peringatan hari besar agama; (4) Hibah, Hibah atau sumbangan didapat secara sukarela tanpa adanya permohonan dari pihak sekolah. Salah satu bentuk dari hibah ini yakni seperangkat komputer dan kebutuhan atau sarana pendidikan dari pemerintah.

Perencanaan Anggaran Pendidikan (*Budgeting*)

1. Proses Perencanaan Anggaran Pendidikan

Menurut Mulayasa, perencanaan pembiayaan di sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan, yakni penyusunan anggaran dan pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS). ¹⁵ APBS berfungsi sebagai pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya, juga sebagai pembatasan dan pertanggungjawaban sekolah terhadap uang-uang yang diterima.

Prosedur perencanaan anggaran pendidikan tingkat sekolah adalah dengan penyusunan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) yang memuat jenis dan besarnya pendapatan dan pengeluaran. Menurut Nanang Fattah Prosedur penyusunan penyusunan RAPBS, yaitu:¹⁶ (a) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran sekolah (1 tahun); (b) Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk uang (pernyataan *financial*). (c) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan

¹³ Ali Mustadi, Enny Zubaidah & Sumardi, Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar, Cakrawala Pendidikan, Vol. 35, No. 3, (Yogyakarta: UNY, 2016), hlm. 314.

¹⁴ Ristekdikti, BT PP 48 Tahun 2008, diakses dari <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id> pada 3 Desember 2019, pukul 19.16.

¹⁵ Mulyasa dalam Masditou, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu, Jurnal ANSIRU PAI, Vol. 1, No. 2, (Medan: POLTEKPAR, 2017), hlm. 135.

¹⁶ Fattah dalam Mimin Sundari Nasution, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Berbasis Total Quality Management (TQM), Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol. 4, No. 2, (Pekanbaru: Universitas Riau, 2016), hlm. 153.

oleh instansi tertentu. (d) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang; (e) Melakukan revisi usulan anggaran; (f) Persetujuan revisi usulan anggaran; (g) Pengesahan anggaran.

Proses perencanaan anggaran pendidikan di SDN Sarirogo diawali dengan pembentukan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) atau RAPBS. RKAS berisikan kegiatan dan anggaran yang diperlukan selama satu tahun, baik berupa kebutuhan barang atau modal. Pembelanjaan dilakukan dalam 3 bulan sekali (tri wulan), sesuai dengan diterimanya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang terkadang jatuh di akhir bulan terakhir dalam tri wulan. Laporan dari RKAS dilakukan pada bulan pertama dalam tri wulan.

2. Alokasi Anggaran Pendidikan

Dana pendidikan di SDN Sarirogo didapat langsung dari pusat melalui bank Jatim yang langsung diterima pihak sekolah setiap triwulan. Dana pendidikan yang diterima sekolah sesuai dengan jumlah siswa yang terdata pada DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) yang akan terus diperbarui setiap bulan. Dana pendidikan yang berasal dari BOSDA dan BOS REG.

BOSDA Sidoarjo merupakan program pemerintah Sidoarjo dalam penyediaan dana pendamping bantuan operasional sekolah (BOS) yang pada dasarnya bertujuan sebagai penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar. Wajib belajar diikuti oleh semua penduduk usia sekolah dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Penyaluran dana BOSDA dilakukan setiap triwulan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.¹⁷

Penggunaan dana BOS dialokasikan untuk kebutuhan operasional pendidikan. Adapun sebelas komponen pembiayaan BOS, yakni:¹⁸ (a) Pengembangan Perpustakaan; (b) Penerimaan Peserta Didik Baru; (c) Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler; (d) Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler; (e) Pengelolaan Sekolah; (f) Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah; (g) Langganan Daya dan Jasa; (h) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah; (i) Pembayaran Honor; (j) Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran; (k) Biaya Lainnya.

¹⁷ JDIH Sidoarjo, Peraturan Bupati Sidoarjo No. 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknik Penyediaan dan Penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Negeri dan Swasta Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018, diakses dari jdih.sidoarjokab.go.id pada 24 November 2019 pukul 8.20 WIB.

¹⁸ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Komponen Pembiayaan BOS pada SD/SDLB dan SMP/SMPLB, diakses dari <http://bos.dispendik.sidoarjokab.go.id/blog/komponen-pembiayaan-bos-pada-sd-sdlb-dan-smp-smplb-pada-3-Desember-2019>, pukul 09.42.

Besaran BOS REG yakni sebesar Rp 800.000 (1 anak per tahun), dan BOSDA sebesar Rp 29.000 (1 anak per bulan). Adapun penggunaan dana pendidikan yakni:

- a. Tri wulan 1 (20% dari jumlah keuangan pemerintah)
- b. Tri wulan 2 (40% dari jumlah keuangan pemerintah)

Penggunaan dana pendidikan terbesar pada tri wulan ke 2, hal ini dikarenakan pembelian buku yang jatuh pada pergantian tahun ajaran baru di sekolah.

- c. Tri wulan 3 (20% dari jumlah keuangan pemerintah)
- d. Tri wulan 4 (20% dari jumlah keuangan pemerintah)

Pembukuan Biaya Pendidikan (*Accounting*)

Pembukuan biaya pendidikan di SDN Sarirogo secara fisik yakni buku kas umum, buku khas tunai, buku bank, dan buku pajak.

1. Buku kas umum

Buku kas umum mencantumkan perjalanan dana pendidikan di bank, baik berisi catatan bunga bank dan potongan bank.

2. Buku kas tunai

Buku kas tunai mencantumkan semua transaksi yang dilakukan setelah dana BOS didapat.

3. Buku bank

Buku bank mencantumkan catatan keluar masuknya uang pusat dan bantuan pemerintah mengenai dana pendidikan.

4. Buku pajak

Buku pajak mencantumkan semua transaksi pembayaran pajak.

Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi dalam dunia pendidikan antara lain:¹⁹

1. Buku pos (*vate book*)

Buku pos pada hakikatnya memuat informasi beberapa dana yang masih tersisa untuk tiap pos anggaran. Buku pos mencatat peristiwa- peristiwa pembelanjaan uang harian.

2. Buku Kas

Buku kas mencatat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran uang serta sisa saldo secara harian dan pada hari yang sama, misalnya pembelian kapur tulis.

¹⁹ Dini Arfian, Manajemen Anggaran Pembiayaan Pendidikan Di SMP NU 07 Brangsong Kendal, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 15-17.

3. Bukti Transaksi

Bukti transaksi adalah dokumen sumber atau instrumen yang menandai bahwa transaksi yang sah telah terjadi.

4. Jurnal

Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi yang dilakukan institusi pendidikan secara kronologis atau berdasar urutan waktu terjadinya, dengan menunjukkan akun yang harus didebet atau di kredit beserta nilai jumlah uangnya masing-masing.

5. Buku besar

Buku besar adalah suatu buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan yang telah dicatat dalam jurnal. Akun-akun tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban atau hutang dan ekuitas.

6. Buku Kas Pembayaran Uang Sekolah

Buku kas pembayaran berisi catatan tentang pembayaran uang sekolah siswa menurut tanggal pembayaran, jumlah, dan sisi tunggakan atau kelebihan pembayaran sebelumnya.

7. Buku Kas Piutang

Buku ini berisi daftar/catatan orang yang berhutang kepada sekolah menurut jumlah uang yang terutang, tanggal pelunasan, dan sisa uang yang belum dilunasi.

8. Neraca Percobaan

Tujuan utama diadakannya neraca percobaan ialah untuk mengetahui secara tepat keadaan neraca pertanggungjawaban keuangan secara tepat, misalnya mingguan atau dua mingguan.

Pelaporan dan Pengawasan Biaya Pendidikan (*Auditing*)

Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggung jawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh seorang pemegang keuangan atau bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang.²⁰ Menurut Fattah, pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya.²¹

Proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yakni memantau (*monitoring*), menilai dan melaporkan hasil-hasil temuan, kegiatan *monitoring* dilakukan terhadap kinerja

²⁰ Dini Arfian, *Manajemen Anggaran Pembiayaan Pendidikan Di SMP NU 07 Brangsong Kendal*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 18-19.

²¹ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 65.

aktual, baik dalam proses maupun hasilnya.²² Dalam pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak luar lembaga (eksternal audit) maupun pihak dalam lembaga atau pimpinan tertinggi (internal audit) terhadap penerimaan dan pengeluaran biaya.²³

Pelaporan biaya pendidikan di SDN Sarirogo dilakukan secara *online* dengan menyerahkan nota ataupun kuwitansi sebagai bukti penggunaan anggaran pendidikan. Dengan tahapan yang lebih rinci yakni membuat nota dan kuwitansi (*hardfile*), scanning bukti nota dan kuwitansi (*softfile*), kemudian mengisi laporan dan melampirkan bukti secara *online* pada laman dinas pendidikan. Pengawasan dilakukan melalui rekonsiliasi BOS, baik BOSDA ataupun BOS REG.

Pengawasan (*monitoring*) penggunaan dana pendidikan di SDN Sarirogo melibatkan beberapa pihak, yakni: Bendahara; Komite sekolah; Kepala sekolah; Dinas pendidikan

SIMPULAN

Proses perencanaan anggaran pendidikan di SDN Sarirogo diawali dengan pembentukan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). RKAS berisikan kegiatan dan anggaran yang diperlukan selama satu tahun. Pembelanjaan dilakukan dalam 3 bulan sekali (tri wulan), sesuai dengan diterimanya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Pembukuan biaya pendidikan di SDN Sarirogo secara fisik yakni buku kas umum, buku khas tunai, buku bank, dan buku pajak.

Pelaporan biaya pendidikan di SDN Sarirogo dilakukan secara *online* pada laman dinas pendidikan. Adapun tahapan pelaporan yakni membuat nota dan kuwitansi (*hardfile*), *scanning* bukti nota dan kuwitansi (*softfile*), kemudian masuk laman dan mengisi laporan serta melampirkan bukti. *Monitoring* dana pendidikan melibatkan bendahara, komite sekolah, kepala sekolah, dan dinas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfian, Dini. (2015). Manajemen Anggaran Pembiayaan Pendidikan Di SMP NU 07 Brangsong Kendal. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. (2019). Komponen Pembiayaan BOS pada SD/SDLB dan SMP/SMPLB. Diakses dari

²² Jefril Rahmadoni, Isu Global Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di SD *Indonesian Creative School* Pekanbaru, Jmksp, Vol. 3, No. 2, (Jambi: STIE Muhammadiyah Jambi, 2018), hlm. 165

²³ Dini Arfian, Manajemen Anggaran Pembiayaan Pendidikan Di SMP NU 07 Brangsong Kendal, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 18-19.

- <http://bos.dispendik.sidoarjokab.go.id/blog/komponen-pembiayaan-bos-pada-sd-sdlb-dan-smp-smplb-pada-3-Desember-2019>, pukul 09.42.
- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. (2019). Mengenal Dana BOS. Diakses dari <http://bos.dispendik.sidoarjokab.go.id/blog/mengenal-dana-bos-pada-3-Desember-2019>, pukul 09.30.
- Fattah, Nanang. (2002). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- JDIH Sidoarjo. (2019). Peraturan Bupati Sidoarjo No. 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknik Penyediaan dan Penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Negeri dan Swasta Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018. Diakses dari jdih.sidoarjokab.go.id pada 24 November 2019 pukul 8.20 WIB.
- Jogolabang. (2019). Penggunaan Dana dan Komponen Pembiayaan Pembiayaan BOS Reguler pada SD. Diakses dari <https://www.jogloabang.com/permendikbud-nomor-18-tahun-2019-tentang-perubahan-juknis-bos-2019/penggunaan-dana-dan-komponen> pada 24 November 2019 pukul 09.49.
- Margareta, R. T. Eka, (2017). Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. Vol. 4, No. 2. Salatiga: UKSW.
- Margareta, R. T. Eka. (2017). Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri. *Jurnal Manajemen Pendidikan* Vol. 4 No. 2. Salatiga: UKSW.
- Masditou. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu. *Jurnal ANSIRU PAI*. Vol. 1, No. 2. Medan: POLTEKPAR.
- Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan*. Depok: Rajawali Pers.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Mustadi, Zubaidah & Sumardi. (2016). Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar, *Cakrawala Pendidikan* Vol. 35 No. 3. Yogyakarta: UNY.
- Nasution, M. Sundari. (2012). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Berbasis *Total Quality Management (TQM)*. *Jurnal Administrasi Pembangunan*. Vol.4, No. 2. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Rahmadoni, Jefril. (2018). Isu Global Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di SD *Indonesian Creative School* Pekanbaru. *JMKSP*. Vol. 3, No. 2. Palembang: Universitas PGRI Palembang.
- Ristekdikti. (2008). BT PP 48 Tahun 2008. Diakses dari <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id> pada 3 Desember 2019, pukul 19.16.

Sagala, Syaiful. (2009). *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*.

Bandung: Alfabeta.

Supriadi, Dedi. (2006). *Satuan Biaya Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.